

PENTINGNYA KUALITAS APARAT PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA LANTUNG KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA¹

Oleh : Stevanly Paulus Pade²

ABSTRAKSI

Pentingnya kualitas bagi aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dari hasil penelitian menunjukan bahwa faktor sikap mental, faktor disiplin, faktor pendidikan bidang pelayanan akan turut menentukan pelaksanaan tugas bagi setiap aparat pemerintah Desa. kualitas bagi aparat pemerintah desa juga akan dilihat dari kemampuan optimal yang dimiliki kepala desa dalam penyelenggaraan kepemimpinan sehingga dengan maksimalnya pelaksanaan tugas aparat pemerintah desa melalui peningkatan kualitas tentu akan mendukung tercapainya pelaksanaan pembangunan yang optimal. Karena aparat pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan yang ada didesa.

Kata Kunci : Kualitas, Pemerintah, Pembangunan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah dimungkinkan untuk meningkatkan berbagai program pembangunan diseluruh wilayah tanah air termasuk program yang diprioritaskan adalah di daerah pedesaan. Karena Desa masih menjadi tumpuan dan harapan serta tulang punggung dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Dikatakan desa masih menjadi prioritas, karena diakui bersama bahwa basis pertumbuhan, dan lumbung produksi serta berbagai penyediaan bahan baku untuk berbagai keperluan baik pangan maupun bahan untuk industri masih dibutuhkan dari daerah pedesaan.

Oleh karena itu pembangunan dipedesaan diperlukan untuk memperkuat kerangka pembangunan Nasional. Berhasilnya pembangunan yang dilaksanakan didesa tentu harus mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa sebagai pelayan masyarakat, harus memiliki kemampuan yang optimal, serta masyarakat harus dapat mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sehingga antara pemerintah desa dan masyarakatnya harus saling mendukung, dimana pemerintah desa sebagai penggerak partisipasi, maka masyarakat juga sebagai pemberi kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan desa, dimana keduanya saling mendukung dan saling mengisi dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada didesa.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah, pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan dalam Undang-undang tersebut dipertegas bahwa Pemerintahan

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

Desa terdiri atas kepala Desa dan Perangkat Desa. Selain aturan yang mengatur tentang Desa maka Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara juga mengatur tentang Desa berdasarkan Perda No. 5 tahun 2013 dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Desa atau dengan sebutan nama lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Perda tersebut diatas juga disentil tentang Pemerintah Desa dan Perangkat desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat-perangkat Desa lainnya. Dalam Pasal 18 (UU No. 6 tahun 2014) dijelaskan pula bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa dan Pembangunan desa telah diatur menyangkut berbagai kewenangan yang dilakukan oleh Desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : 1) kewenangan berdasarkan hak asal usul, 2) kewenangan local berskala desa 3). Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Propinsi atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan 4). Kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah daerah propinsi atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rumusan Maslah

Sejauh mana peningkatan kualitas aparat pemerintah desa akan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan desa Lantung.

Tujuan Penelitian

Mengetahui kualitas aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Lantung Kecamatan Wori

Manfaat Penelitian

- 1 Secara praktis, kita dapat mengetahui sejauh manaperan kepala desa dalam pembangunan di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten MinahasaUtara dalam menjalankan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerjanya.
2. Secara teoritis diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kerja aparat pemerintah desa Lantung dalam melaksanakan kerja yang efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Poerwadarminta W.J.S diterangkan bahwa : "Kualitas atau kwalitet adalah baik buruknya sesuatu". Jadi apabila mengikuti secara dalam dan disiplin mengenai pengertian ini, maka penggunaan istilah ini haruslah kualitas baik, kualitas buruk, kualitas tinggi dan kualitas rendah ; artinya harus dilengkapi lagi, tidak tinggal mempergunakan kualitas saja. Kiranya boleh saja mempergunakan kata kualitas positif, kualitas negatif dan sebagainya. Pengertian ini jelas pula bahwa menggunakan istilah kualitas itu seharusnya dilengkapi dengan sifat-sifat tertentu agar menjadi pemimpin yang baik, yaitu vitalitas, intelegensia, humanitas, moralitas dan lain-lain.Jadi apabila

kualitas ini tidak dilengkapi dengan sifat-sifat tersebut diatas, maka muncullah hakekat pengertiannya, berarti tidak tepat dan jelas pemakaiannya.

Selanjutnya menurut Prof. Drs. A.L. Tampi dalam makalah "Peningkatan kualitas manusia Indonesia" (1983), menjelaskan Kualitas dapat diartikan dengan mutu atau juga dalam bahasa praktis disamakan dengan kata bobot, nilai, dan lain-lain. Berangkat dari pengertian ini dapat diperjelas lagi dengan hal-hal menyangkut derajat kepandaian, derajat kecerdasan, derajat kemampuan atau kualitas yang dilengkapi dengan vitalitas (keunggulan), kelebihan intelegensi, bertindak humanitas dan dengan bersifat moralis. Maka dalam pengertian teknis operasional, adalah mutu dari orang atau orang-orang yang memiliki keahlian, kecerdasan, keterampilan dan berpandangan luas serta berkemauan untuk maju dan berhasil (sukses).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas manusia itu adalah suatu ukuran tentang derajat profesionalisme, derajat kecerdasan, derajat keterampilan, derajat kemauan dan kemampuan, derajat kebaikan dan kejujuran yang dipergunakan bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang diimplementasikan sebagai bentuk daya juang, pengabdian dan pengamalan.

Goetsch dan Davis dalam Tjiptono (2007 : 18) mengatakan kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi harapan. Juran dalam Mauludin (2010 : 28) menyatakan kualitas merupakan perwujudan atau gambaran-gambaran hasil-hasil yang mempertemukan kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan dalam memberikan kepuasan. Lebih lanjut menurut Juran bahwa dua hal yang berhubungan dengan kualitas suatu produk yaitu, produk harus mempunyai keistimewaan dan bebas defisiensi.

Berkaitan dengan konsep Desa maka Soeparmo (2007 : 11) bahwa perkataan Desa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Istilah Desa tidak dipakai diseluruh daerah di Indonesia. Setiap daerah biasanya menggunakan istilah masing-masing sebagai contoh Sumatera Selatan menamakan Desa mereka dengan istilah " Dusun " atau daerah gabungan disebut " Pendopo " atau " " Marga " . Sumatera Barat menggunakan istilah " Nagari " atau daerah gabungannya dengan sebutan " Luhak " , Sumatera Timur menyebutnya " Suku " Aceh menyebutnya " Gampong " atau " Meunasah " , Daerah Minahasa dengan istilah " Wanua " , Maluku menyebutnya " Negeri " atau " Dati " masih banyak lagi istilah-istilah lainnya yang belum dapat dijelaskan disini.

Soetardjo Kartodihardjokoemo (1969 : 15) yang dikutip oleh Surjadi (1999 : 32) mengatakan Desa adalah suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Dalam Kepres No. 72 tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa " Desa " atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat , berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, prosedur pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2014).

Pendekatan ini mementingkan fenomena yang teramati dan konteks makna yang melingkupi suatu realitas, menggambarkan atau melukiskan keadaan objektif/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain).

Metode kualitatif merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis adalah Mencakup:

A. Kualitas Aparatur Pemerintah Pembangunan desa

C. Jenis dan Sumber data

Jenis Sumber data yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Data Primer. Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian, sumber data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ialah:

- a) Penelitian Sendiri

Catatan lapangan yang berupa catatan-catatan yang dipergunakan untuk mencatat informasi terutama selama penelitian.

- b) Informan

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Tokoh Masyarakat
4. Kaur Pemerintahan

2. Data Sekunder

Data sekunder yang merupakan sumber data yang akan melengkapi sumber data primer, Yaitu: Dokumen-Dokumen yang membantu dalam penelitian (Dokumen-Dokumen yang dikeluarkan pemerintah, laporan-laporan dan arsip-arsip lainnya).

D. Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

E. Teknik Analisa Data

- a. Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah di baca dan di pahami. Sebagaimana dinyatakan oleh Miles dan huberman bawa analisa data pada penelitian kualitatif dilakukan secara mengalir dari tahap awal hingga penarikan kesimpulan sehingga disebut model alir.

- b. Mendeskripsikan data, biasanya dalam bentuk frekuensi, ukuran tendensi sentral maupun dispersi, sehingga dapat dipahami karakteristik datanya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualitas Aparatur Pemerintah Pembangunan desa

Upaya peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan guna dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik, yang dimaksudkan untuk melestarikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Bagi aparat pemerintah desa perlu memahami dengan pasti apa perannya dalam pelayanan publik, bagaimana mewujudkan kualitas layanan yang memuaskan bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan publik, dan bagaimana seharusnya aparat pemerintah desa akan mampu melayani dengan baik. Keberhasilan Pemerintah Desa ditandai dengan keberhasilan para penyelenggara pemerintah desa termasuk aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tanggungjawabnya yang esensinya adalah sebagai penyelenggaraan fungsi pelayanan. Salah satu sorotan yang menghambat kinerja pelayanan publik di daerah pedesaan disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah desa terhadap bidang pelayanan tersebut antara lain rendahnya kualitas aparat sehingga mempengaruhi sistem pelayanan yang maksimal. Sistem pelayanan yang maksimal dapat terukur dan teraplikasikan dengan baik apabila didukung dengan perangkat sebagai pelaksana yang mampu memahami tugas-tugasnya. Banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam proses pelayanan antara lain keluhan masyarakat dengan cara pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah desa mulai dari system pelayanan yang sangat lamban, tidak transparan, tidak tepat waktu, memberi janji yang tidak pasti, mengutamakan sistem pelayanan yang tidak sesuai seperti sistem antrian lebih mengutamakan teman sejawat, saudara, atau karena faktor tertentu seperti ada uang pelicin. Cara pemberian pelayanan seperti ini turut menghambat kinerja pelayanan, sehingga target yang dicapai dalam kinerja pelayanan publik kurang maksimal. Rendahnya kinerja pelayanan publik ada hubungannya dengan tingkat pengetahuan aparat Desa terhadap kegiatan pelayanan, rendahnya disiplin kerja serta kurangnya kesadaran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Pemberdayaan aparat pemerintah Desa akan bertumpu pada kemampuan mengelola potensi sumberdaya atau modal social masyarakat secara optimal,

Hasil penelitian tentang peningkatan kualitas bagi aparat pemerintah desa penulis mewawancarai Bapak G.B. beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa Lantung. Penulis menanyakan tentang bagaimana system pelayanan yang dilakukan bagi aparat pemerintah Desa di desa Lantung. G. menyatakan bahwa system pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah Desa khususnya di Desa Lantung sampai saat ini dapat dikatakan sudah cukup baik terutama dalam kaitan dengan pelayanan surat-surat isin bepergian, Kartu Keluarga dan berbagai persyaratan surat izin lainnya. Hanya saja yang menjadi kendala kalau kepala Desa tidak berada ditempat sehingga proses pelayanan seringkali proses pelayanan tertunda karena dengan alasan harus ditandatangani oleh Kepala Desa. Dalam proses pelayanan penggunaan keuangan yang berkaitan dengan syarat administrasi bisa dijangkau oleh masyarakat terutama saya sebagai pelaku pelayanan publik. Dalam proses pelayanan di Kantor Desa aparat selalu bersikap ramah dengan mengutamakan system kekeluargaan.

B. Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Kepala Desa

Salah satu unsur kekuatan efektif didalam menjalankan roga pemerintahan di daerah pedesaan akan tergantung pada efektifitas kepemimpinan kepala desa. Sebab kepala desa sebagai unsur dari aparat pemerintah desa juga melekat padanya sebagai seorang pemimpin yang memiliki tugas dan tanggungjawab yang cukup besar.

Karena itu kepala desa memiliki posisi yang sangat strategis didalam masyarakat. Kepala desa disamping sebagai pemimpin juga memiliki fungsi sebagai seorang manager tentu dituntut harus memiliki kapasitas, kapabilitas, pro aktif, memiliki kemampuan untuk mengatur suatu organisasi. Organisasi pemerintahan desa dapat berfungsi manakala seorang kepala desa memiliki kemampuan untuk mengatur suatu organisasi. Organisasi pemerintahan desa berfungsi ,manakala seorang kepala desa memiliki kemampuan menjalankan pola kepemimpinannya dengan baik. Inti dari keberhasilan kepala desa dalam menjalankan kepemimpinannya akan tergantung pada kepengikutan masyarakat serta bawahannya (perangkat desa). Karena tanpa adanya bawahan atau dukungan dari masyarakat, maka kepala desa tidak akan dapat menjalankan program-programnya. Seorang kepala desa tentu harus memiliki kemampuan dalam :

- a. Membangkitkan kepercayaan dan loyalitas kepada bawahan atau masyarakat. Kepercayaan dan loyalitas seperti ini harus perlu dimiliki, karena tanpa adanya dukungan maka tidak akan mungkin kepala desa mampu mempengaruhi bawahan atau masyarakatnya,
- b. Seorang kepala desa juga harus memiliki kemampuan dalam mengaplikasi berbagai potensi yang dimiliki dalam masyarakat,
- c. Seorang kepala desa tentu harus mendapat simpati, disenangi, dikagumi, dihormati, serta dijunjung tinggi oleh para bawahan maupun masyarakatnya,
- d. Kepala desa merupakan salah seorang yang memiliki kemampuan dalam memberikan motivasi kepada para bawahan atau masyarakatnya,
- e. Kepala desa harus perlu memiliki kepercayaan diri, integritas pribadi, kematangan emosional, agresivitas , tahan terhadap tekanan, energik dan antusiasme.

Dengan demikian berbagai karakteristik yang disebutkan diatas perlu dimiliki oleh seorang kepala desa. Hasil penelitian melalui wawancara dengan informan H.O. penulis menanyakan bagaimana upaya bapak dalam melaksanakan berbagai kepemimpinan yang ada didesa. Menurut H.O. bahwa kepemimpinan yang melekat pada diri saya dapat diaplikasikan lewat berbagai kegiatan pembangunan yang ada didesa, terutama dalam kaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan program. Selama ini dalam proses pelaksanaan atau pengajuan proyek-proyek pembangunan telah disesuaikan berdasarkan usulan dari masyarakat. Artinya melalui kepemimpinannya masyarakat dapat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Realiasi dari proses perencanaan pembangunan dapat dikelompokkan dalam bidang kegiatan pengembangan, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Bidang pengembangan melalui kepemimpinan kepala desa dapat diaplikasikan dalam kegiatan yakni perbaikan kebun Tuur sampai dengan rukun tani, pembangunan jalan alternatif karimbow, token dan terbangunnya jalan produksi, pembangunan drainase, pengaspalan jalan kelapangan olahraga watu, pembangunan balai pertemuan umum, dan pembangunan jalan setapak lokasi jaga V.

Dalam bidang ekonomi telah diupayakan berbagai program yakni dalam sector pertanian dilakukan pengadaan pembasmi hama, pengadaan bibit tanaman hortikultura (pala) , pengadaan ternak babi, pengadaan pengolahan minyak kepala murni. Dalam

bidang sector perikanan telah diupayakan pengadaan tambak ikan, pengadaan bantuan perikanan, dan pengadaan angkutan pertanian.

Juga dalam proses penyelenggaraan program pembangunan maka kepala desa juga mengambil suatu kebijakan yang sifatnya strategis terutama dalam proses pengambilan keputusan. Sebab sebagai seorang kepala desa sebagai wakil pemerintah dalam kaitan dengan pelaksanaan program pembangunan tentu harus memiliki kemampuan yang tinggi. Juga yang menjadi titik perhatian program kepemimpinan kepala desa yakni melalui upaya untuk menggali potensi desa khususnya dalam skala prioritas pembangunan pertanian dan bidang perikanan.

Menurut H.O. salah satu program kepemimpinan yang dia lakukan adalah membangkitkan semangat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dapat diaplikasikan lewat sumbangan pemikiran melalui proses pengambilan keputusan, membangkitkan partisipasi tenaga lewat kegiatan kerjabakti maupun pelaksanaan proyek-proyek pembangunan desa, partisipasi harta benda berupa sumbangan masyarakat dalam kegiatan pembangunan ibadah maupun pembangunan Balai desa. Lewat kepemimpinan kepala desa partisipasi masyarakat dapat dikembangkan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi mulai tumbuh secara nyata.

Senada dengan pendapat H.O. penulis mewawancarai salah satu anggota masyarakat yakni Informan C.G. penulis menanyakan tentang bagaimana pendapat Bapak tentang pola kepemimpinan kepala desa dalam membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Menurut C.G. pola kepemimpinan kepala desa dalam kaitan dengan pelaksanaan pembangunan adalah melalui pola kepemimpinan partisipatif dimana kepala desa lebih mengutamakan prinsip keseimbangan antara pemerintah desa dan masyarakat. Pola keseimbangan tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan secara bersama-sama antara kepala desa dengan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

C. Kualitas Aparat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa.

Secara khusus dapat kita lihat dari aspek pemerintahan desa, bahwa peranan administrasi pemerintahan desa, telah memegang peranan penting. Dikatakan demikian karena desa merupakan lumbung sumberdata dan informasi dari semua jajaran instansi serta departemen yang ada memerlukan data dan informasi dari desa itu sendiri.

Oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa juga akan ditentukan oleh adanya peranan administrasi pemerintahan desa itu sendiri. Namun harus diakui bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang dijalankan selama ini belum sepenuhnya dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. Pada hal didesa telah tersedia tenaga-tenaga yang dapat diharapkan mampu mengemban tugas pemerintahan desa itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya didesa-desa masih kekurangan tenaga-tenaga trampil yang mampu mengelola pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

Proses penyelenggaraan UU N. 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai salah satu Undang-Undang yang mampu menata dan menyelenggarakan system pemerintahan Desa dan system administrasi pemerintahan desa secara seragam diseluruh Indonesia. Dari segi penataan organisasi dapat difahami tiga aspek penting yang dapat

diimplementasikan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, antara lain tentang struktur Organisasi yang dituangkan dalam UU No. 6 tahun 2014 dalam Pasal 26 ayat (3) dimana kepala desa yang mewakili pemerintah desa untuk mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, bidang Personal juga telah diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 25 tentang pemerintah Desa yang lebih menekankan pengadaan personil lewat tugas kepala desa dalam melaksanakan rekrutmen (Pengadaan personil lihat pasal 26 ayat (2) b. yakni kepala desa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, dan bidang prosedural antara lain dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pada pasal 26 ayat (2) d. yakni realisasinya dapat diaplikasikan dalam proses penetapan peraturan desa, penetapan APBD. Dalam bidang prosedural ini pola penataan administrasi pemerintahan Desa juga pemerintah desa telah melaksanakan fungsi legislasi terutama dalam kaitan dengan pembuatan peraturan Desa.

Administrasi pemerintahan desa merupakan salah satu sarana dari pemerintah desa dalam hal ini perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya. Untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa aparat pemerintah desa akan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam pengelolaan bidang tugasnya masing-masing.

Hasil penelitian tentang peningkatan kualitas dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa khususnya bagi aparat pemerintah desa maka penulis akan mewawancarai Informan S.T. penulis menanyakan bagaimana pemahaman Bapak tentang tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki aparat pemerintah desa dalam proses pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Menurut S.T. bahwa tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki aparat pemerintah Desa dapat dikatakan cukup baik karena mereka juga sudah memiliki pengalaman dalam mengelola administrasi pemerintahan desa, hanya saja dilihat dari latar belakang pendidikan 1 (Satu) orang berlatar belakang pendidikan SLTA dan 2 (Dua) orang berlatar belakang pendidikan SLTP sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

Selain pembahasan yang dikemukakan diatas maka pelaksanaan administrasi pemerintahan desa telah memiliki berbagai fungsi antara lain fungsi dalam pelaksanaan bidang pemerintahan yang dituangkan dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa dalam Bab V Pasal 23 juga dalam pasal 26 ayat 1 (satu) dan fungsi kelembagaan Desa antara lain diaplikasikan lewat tugas dan Fungsi BPD dalam Pasal 55 ayat a,b, dan c. serta pelaksanaan hubungan kerjasama antara Kepala Desa dan BPD lewat pasal 69 dalam ayat 3 (tiga) dimana peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD serta dituangkan dalam pasal 73 ayat (2) terutama dalam kaitan dengan penetapan APBD.

Fungsi lain yang melekat dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa adalah fungsi dalam bidang pelayanan umum, khususnya yang berkaitan dengan pemberian izin keramaian, izin meninggalkan desa, mendirikan bangunan baru. Fungsi pelayanan umum juga berkaitan dengan surat keterangan dalam berbagai keperluan antara lain surat keterangan bukti diri (kenal lahir,mati) surat nikah, surat bukti diri kartu penduduk, surat kelakuan baik, surat keterangan seperti akte jual beli.

Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa juga dikenal dengan administrasi umum, administrasi penduduk dan administrasi keuangan. Dalam administrasi umum dilokasi penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang penulis peroleh dari wawancara dengan Kaur Umum Bapak N. L. telah didapati berbagai jenis administrasi umum antara lain : 1). Buku Keputusan Desa, 2). Buku Keputusan Kepala

desa, 3). Buku Kekayaan Desa, 4). Buku Agenda Desa, 5). Buku Ekspedisi, 6). Buku Aparat Pemerintah Desa dan 7). Buku tanah desa.

Dalam kaitan dengan administrasi penduduk maka jenis-jenis buku administrasi penduduk di desa Lantung antara lain berkaitan dengan 1). Buku Induk Penduduk yang merupakan buku secara lengkap mencatat data dari setiap penduduk. 2). Buku penduduk sementara, yang merupakan buku yang mencatat data dari seorang pendatang. 3). Buku Perubahan Penduduk yang merupakan buku tentang penduduk yang pindah, mati, datang maupun lahir. 4). Buku perkembangan penduduk yakni buku tentang perkembangan setiap akhir bulan pada bulan yang bersangkutan, 5). Buku Kartu Keluarga yakni buku tentang kumpulan dari masing-masing anggota keluarga. 6). Buku Kartu Tanda Penduduk, dan Buku Jumlah Penduduk yang merupakan buku tentang kumpulan penduduk setiap tiga bulan sekali pada setiap akhir bulan yang bersangkutan pemerintah desa berkewajiban untuk mencatat keadaan penduduknya dalam buku jumlah penduduk.

Selain proses pembukuan yang dijelaskan diatas maka pelaksanaan administrasi pemerintahan desa juga dikenal dengan administrasi tentang Keuangan Desa yang memuat tentang 1). Buku Anggaran Desa yang menyangkut anggaran rutin dan anggaran pembangunan, 2). Buku Kas Umum yang menyangkut data yang berhubungan dengan keuangan desa baik rutin maupun pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan yang dicatat dalam buku kas umum. Dan 3). Buku Kas Pembantu, yang merupakan buku sebagai alat control terhadap keadaan keuangan tunai pada setiap Kas Desa.

Dari apa yang dikemukakan diatas maka upaya peningkatan kualitas dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa akan menjadi sangat penting dan menentukan dalam proses pendataan dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selain peningkatan kualitas dalam proses pengelolaan administrasi pemerintahan desa juga harus dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti pengadaan komputer, Papa Statistik Desa sebagai fungsi untuk mendapatkan data dan informasi baik dari pemerintah desa, masyarakat maupun instansi lainnya yang memerlukan data dan informasi tersebut. Didesa Lantung dari hasil wawancara dengan M.M. sebagai Kaur Pemerintahan tentang sarana yang menunjang proses pengelolaan administrasi pemerintahan Desa maka telah tersedia 2 perangkat komputer guna mempercepat proses pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembangunan dipedesaan diperlukan untuk memperkuat kerangka pembangunan Nasional. Berhasilnya pembangunan yang dilaksanakan didesa tentu harus mendapat dukungan yang kuat dari aparat pemerintah Desa dan masyarakat. Dimana pemerintah desa sebagai pelayan masyarakat harus memiliki kemampuan yang optimal yang dapat mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan. Kemampuan optimal tersebut dapat dilihat dari peningkatan kualitas seperti peningkatan dalam kaitan dengan pengembangan sikap mental bagi aparat pemerintah Desa. Hasil penelitian membuktikan bahwa peningkatan kualitas melalui pengembangan

sikap mental hasil wawancara dengan informan membuktikan bahwa sikap mental aparat pemerintah desa cukup baik dalam pelaksanaan tugas.

2. Aparat pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan desa perlu memiliki nilai dan sikap yang dapat diaplikasikan dengan kedisiplinan yang tinggi. Sebab cerminan disiplin sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas bagi aparat pemerintah Desa. Hasil penelitian melalui wawancara dengan informan membuktikan bahwa pelaksanaan disiplin bagi aparat pemerintah Desa sudah cukup baik yang dibuktikan dengan pelaksanaan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas, untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa. Sehingga dapat difahami bahwa factor disiplin bagi aparat pemerintah desa sangat penting untuk dilakukan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa.
3. Peningkatan kualitas bagi setiap aparat pemerintah desa harus dilandasi dengan peningkatan profesionalisme yakni melalui tingkat pendidikan. Namun hasil penelitian membuktikan dari wawancara dengan informan bahwa sebagian besar aparat pemerintah desa dilihat dari latar belakang pendidikan masih belum memadai karena masih ada sebagian perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan SLTP. Namun hasil penelitian juga membuktikan bahwa sebagian besar informan sangat setuju dan persyaratan minimal dalam pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap aparat pemerintah desa dimana sesuai dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa maka syarat minimal tentang pendidikan sudah ditentukan dalam pasal 50 ayat (1) tetapi kenyataannya dilokasi penelitian belum sepenuhnya mampu direalisasikan mengingat kemauan masyarakat untuk memberi diri dalam mengabdikan tugasnya di desa belum tumbuh secara nyata. Karena dengan latar belakang pendidikan yang memadai bagi setiap aparat pemerintah desa akan turut mempengaruhi sikap dan perubahan perilaku dalam melaksanakan tugas.

Saran

Aparat pemerintah desa sebagai unsur staf dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk memiliki kualitas yang baik dan memadai dalam pelaksanaan tugas. Melalui penelitian ini disarankan bahwa untuk meningkatkan kualitas bagi setiap aparat pemerintah desa perlu dibarengi dengan peningkatan sikap mental, pendidikan formal sebagai prasarat untuk merubah pola pikir dan wawasan bagi setiap aparat pemerintah desa.

1. Peningkatan kualitas bagi setiap aparat pemerintah desa harus didukung dengan peningkatan disiplin. Melalui penelitian ini disarankan hendaknya aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya haruslah memiliki kedisiplinan yang tinggi serta dilandasi dengan pengabdian, dedikasi serta pengabdian yang tinggi dan taat pada setiap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bidang pelayanan menjadi factor kunci dalam pelaksanaan tugas pemerintahan oleh karena itu dalam menjalankan tugas pelayanan yang baik setiap aparat pemerintah desa hendaknya memiliki kemampuan yang optimal melalui pelayanan prima yang diaplikasikan melalui pelayanan yang ramah, tepat waktu, prosedur pelayanan dipermudah serta mengutamakan biaya pelayanan yang murah yang bisa dijangkau oleh seluruh anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto R. 2005, *Interaksi Desa dan Kota serta permasalahannya*, PT Gramedia Jakarta.
- Bouman P.J. 2001, *Sosiologi suatu pengantar*, CV. Rajawali Jakarta.
- Firman Aji dan Sirait, 2002, *Pembangunan berwawasan Lingkungan*, Penerbit Pradnya paramita Jakarta.
- HAW Widjaya 2008, *Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh*, PT Raja Grafindo Persada
- Hessel Nogi. S. Tangkilisan 2005, *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, Penerbit Lukman Offset.
- Hasibun, S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Joko Siswanto 2005 *Administrasi Pemerintahan Desa*, Cv Rajawali Jakarta.
- Koentjaraningrat 2005, *Kebudayaan dan Mentalitas Pembangunan*, PT Gramedia Jakarta.
- Mariun 1969, *Ilmu Pemerintahan*, Yayasan Dian Desa
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendy, 2005, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit CV Rajawali Jakarta.
- Mathis dan Jackson, 2001 *Kebijakan Publik*, Dian Prajudi Jakarta.
- Mauludin 2003, *Kualitas Sumberdaya manusia*, Penerbit PT Gramedia Jakarta.
- Mayor Polak J.B.A.F. 1976, *Sosiologi suatu Pengantar ringkas*, Penerbit Gunung Mulia Jakarta.
- Moleong Lexy.L.J. 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya Bandung.
- Ndraha Taliziduhu 1987, *Menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa*, PT Gramedia Jakarta.
- Poerwadarminta W.J.S 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Penerbit Balai Pustaka Nasional.
- Sulistiyani dan Rosidah 2003, *Manajemen Aparatur Pemerintah*, Penerbit Intan Setia Jakarta
- Suparyogo, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Bina Marga Jakarta.
- Sutardjo Kartohadikusumo 1975, *Desa dan Pembangunan Desa*, PT Sinar Mas Jakarta.
- Siagian 1987, *Pengantar Ilmu Administrasi*, PT Gramedia Jakarta.
- Suprayogo 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pradnya Paramita Jakarta.
- Slamet Ryadi 1993, *Pembangunan Desa*, Yayasan Obor Mas,
- Tjiptono 1997, *sumberdaya berkualitas*, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta.
- Umar Said 1999, *Administrasi Pemerintahan Desa*, CV Rajawali Jakarta.

Sumber-sumber lain :

- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa
- Perda No. 5 tahun 2013 tentang pengaturan Desa

